

## IKHTISAR EKSEKUTIF



Pelayanan publik kearah lebih transparan dan akuntabel merupakan isu aktual yang mendapat respon positif dari Pemerintah Kabupaten Bireuen. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara akibat meningkatnya kapasitas sumber daya manusia serta semakin berkembangnya sarana informasi publik atau media masa yang terus bergerak mengikuti pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang menembus sekat-sekat ruang dan waktu termasuk pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dapat menjadi salah satu dokumen Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam upaya pemenuhan informasi pelayanan publik yang berisikan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan selain dimaksudkan sebagai pemenuhan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 merupakan dokumen LKIP tahun ke empat dari implimentasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2017 dalam upaya kerja perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bireuen sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang kongkrit dan aplikatif dari pemerintah sebagai acuan penilaian kinerja dimulai pada setiap awal tahun anggaran pemerintah juga dituntut untuk menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang

merupakan himpunan Rencana Kerja (Renja) SKPK, kemudian pada akhir tahun diwajibkan mempertanggung jawabkan pelaksanaan rencana kerjanya.

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen tahun 2016 dilakukan dengan membandingkan Rencana Kinerja yang telah disusun dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai, kemudian dilakukan perbandingan capaian realisasi terhadap sasaran pada dokumen RPJMD. Dengan kata lain Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen tahun 2016 adalah hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis melalui proses penyesuaian dan penajaman rumusan sasaran yang didukung Indikator Kinerja Utama (IKU).

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen terdiri dari 17 sasaran dan 56 (lima puluh enam) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa tingkat rata-rata capaian kinerja sebesar 65,14 persen melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen sebesar Rp 1.952.340.765.404,38 dengan tingkat serapan sebesar 94,13% atau sebesar Rp 1.837.755.025.767,30 (unaudited).

Terlepas dari kendala dan keterbatasan yang ada, LKIP Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 ini merupakan upaya untuk mempertanggung-jawabkan kinerja yang dicapai Pemerintah Kabupaten Bireuen, dengan harapan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Bireuen, Maret 2017  
SEKRETARIS DAERAH,



**Ir. ZULKIFLI, Sp**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 196102151992031002